

## Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang

**Iwan Henri Kusnadi**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang

[iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)

### Abstrak

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal.

**Kata Kunci:** Kolaborasi tata kelola, jejaring, HIV/AIDS

### Abstract

*The Collaborative Governance Network in the Communication, Information and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public*

*value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcome have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.*

**Keywords :** *collaborative governance, networks, HIV/AIDS*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan Publik yang tidak ringan tetapi sekaligus sangat membahayakan kehidupan manusia diantaranya masalah HIV/AIDS. HIV / Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. HIV menyerang system kekebalan tubuh (sel darah putih), sehingga orang yang terkena virus ini akan mudah terserang berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya. Sedangkan AIDS / Acquired Immune Deficiency Syndrom adalah kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya system kekebalan tubuh akibat dari HIV. HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan global yang penting karena frekuensi dan tingkat kematian yang tinggi. Kasus HIV/AIDS ini menjadi masalah publik yang perlu perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan merupakan bagian kecil dari keadaan sebenarnya, dimana yang tampak hanyalah puncaknya saja. Sama halnya dengan penyakit HIV/AIDS yang tampak hanyalah kasus yang dilaporkan saja. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) merupakan kumpulan gejala dan penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan terinfeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

Di Kabupaten Subang, kasus HIV/AIDS dapat dikatakan permasalahan yang tergolong memprihatinkan meningkat setiap tahunnya dan sudah dinilai sebagai ancaman serius. Penyebab tingginya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Subang itu

karena wilayah Kabupaten Subang merupakan lintasan nasional, dan memiliki objek wisata internasional, yakni Jalur Pantura yang tidak pernah mati dilalui para supir truk angkutan barang, begitupun dengan jalur wisata yang banyak dikunjungi para tamu asing.

Kasus ditemukannya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Subang tidak hanya diderita oleh kalangan tertentu, tetapi hampir semua golongan usia dan profesi. Mulai dari usia bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, juga berbagai profesi, PSK, Ibu Rumah Tangga, Buruh, Wiraswasta, Narapidana, Karyawan, Supir, Petani, TKI, PNS, Pelajar dan Mahasiswa. HIV/AIDS dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV/AIDS bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat. Karena HIV/AIDS tidak saja mengancam kehidupan anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Pemerintah Kabupaten Subang ternyata telah melakukan intervensi dan sudah ditanggulangi yang didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Maksud dibentuk Peraturan Presiden ini adalah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih insentif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Subang. Maksud dibentuk Peraturan daerah ini adalah untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan permasalahan HIV dan AIDS secara Komprehensif, Integratif, Partisipatif dan Berkesinambungan.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang Pasal 5 ayat 2 ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas.

Berdasarkan pasal 6 huruf G dan H tersebut upaya yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang diantaranya adalah program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah berlangsung pada tahun 2009 hingga sekarang. Program KIE ini ditempuh dengan menjalankan kerjasama melalui jaringan berbagai *Stakeholder* baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Upaya berbagai upaya termasuk program KIE telah dilakukan tetapi angka orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tetap tinggi dan cenderung naik. Melihat Fenomena tentang besarnya jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Subang, maka dibutuhkan sumberdaya yang cukup memadai dalam melaksanakan seluruh tindakan pelayanan kesehatan pada penderita HIV/AIDS. Namun pada kenyataannya, perbandingan antar jumlah sumberdaya dengan jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Subang masih belum sebanding.

Berdasarkan hal inilah yang menjadi landasan pemerintah Kabupaten Subang perlu menggunakan strategi dengan melibatkan aktor lain diluar pemerintah. Maka

strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan *Collaborative Governance* dengan para aktor tersebut. Karena ini sudah menjadi kebutuhan pemerintah. Dalam program KIE ini sudah menempuh program yang menggunakan model *Governance* dengan pemanfaatan jejaring antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. KIE berlangsung melalui Jejaring kemitraan dalam bentuk *Collaborative Governance*. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan belum efektifnya *Collaborative Governance*, diantaranya : (1) Kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan pemerintah bekerja sendiri dan, (2) Keterbatasan akses sumber daya pemerintah yang memadai untuk menjawab permasalahan HIV/AIDS yang mana dalam penyelesaiannya harus bersifat lintas sektor dan melibatkan semua pihak, adanya kepedulian terhadap permasalahan HIV/AIDS. Tujuannya untuk menghasilkan nilai publik yang lebih dari setiap tingkat sumberdaya. Data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang pada tahun 2017 mencatat dari 300 kasus HIV/AIDS yang menderita sebanyak 1.618 orang, sedangkan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang pada tahun 2018 menempati peringkat ke-4 di Jawa Barat, dengan angka kematian mencapai 564 korban jiwa dengan penderita 1.873 orang dengan 230 kasus.

Kasus HIV/AIDS pada remaja di Kabupaten Subang setiap tahun perlu mendapatkan perhatian. Jumlah akumulatif dari tahun 1999 sampai tahun 2018 sebanyak 1.873 orang. Dilaporkan berdasarkan resiko pekerjaan WPS (Wanita Pekerja Seks) menduduki peringkat pertama dengan sebanyak 572 orang, Ibu Rumah Tangga 381 orang, Buruh 277 orang, Wiraswasta 211 orang, Narapidana/Warga Binaan 70 orang, Karyawan 69 orang, Waria 44 orang, Anak-anak 66 orang, Supir 36 orang, tidak bekarja 36 orang, Petani 36 orang, TKI 20 orang, PNS 19 orang, Pelajar 9 orang, penata kecantikan 9 orang, Nelayan 8 orang, Mahasiswa 5 orang, TNI & POLRI 5 orang, pekerja seni 1 orang, Dosen 1 orang, dan satpam 2 orang. Berdasarkan Penularan Hubungan Seks 1456 (77%), Pengguna Napza Suntik 65 (4%), Homoseksual 259 (27%), penularan Ibu ke Anak 91 (5%), dan Usia produktif antara 15-49 tahun sebanyak 93,8%. (KPA Kabupaten Subang, 2018).

Kerangka teori yang ditentukan dalam kajian ini bahwa *Collaborative Governance* adalah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat normal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau *asset* pulik. (Ansell and Gash, 2007:544)

*Collaborative Governance* antar *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Maka dari itu, peneliti menggunakan dimensi menurut Huxham dan Imperial untuk melihat bagaimana antar *stakeholder* yang meliputi: *Face-to-face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the process*, *Shared Understanding*, *Intermediate Outcomes*.

## Kerangka Teori

### Konsep *Collaborative Governance*

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

“Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *Stakeholder* yang terikat untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002 dalam Subarsono, 2016 : 174)”.

Dalam definisi ini tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Hanya saja memang pada umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. *Collaborative Governance* menurut Agrawal dan Lemos (2007) dalam Subarsono (2016:176) bahwa :

“Definisi *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakholder* yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil. Dengan diharapkan memiliki sinergi peran *Stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial”. Definisi serupa disampaikan oleh Balogh dkk (2011) dalam Subarsono (2016:176), dijelaskan bahwa: “*Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”. Robertson & Choi (2010) dalam Subarsono (2016:176), mendefinisikan : “*Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut”. Dwiyanto (2011 dalam Subarsono (2016:177), menjelaskan secara terperinci bahwa : “Aktivitas kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama”. Hampir sama dengan yang disampaikan Dwiyanto, Sink menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai : “Sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam



rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri". Dari kedua pendapat di atas maka maksud pesan yang disampaikan hampir sama, yakni setiap organisasi atau entitas yang tergabung di dalam kerjasama tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang akan diusung di dalam sebuah kebijakan dan masing-masing menawarkan solusi alternatif dari sebuah permasalahan namun tetap harus menjunjung kesepakatan bersama (Widiyanto, Hikmawan, & Riswanda, 2019). Fosler (2002) dalam Subarsono (2016:177), menjelaskan bahwa : "Dalam kerjasama kolaboratif para pihak yang terlibat secara sadar harus melaksanakan *alignment, shared vision* dan *liabilities* keseluruhannya dilakukan atas kesepakatan bersama". Emersom (2011) dalam Purnomo (2018:13), mendefinisikan sebagai : "Proses dan struktur pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, LSM, dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan sendiri" Sementara Mc Guire (2006) dalam Purnomo (2018:13), menjelaskan bahwa : "*Collaborative Governance* adalah konsep di dalam management pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun LSM yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja". Wanna (2008) dalam Purnomo (2018:13), mendefinisikan bahwa : "Kerjasama memiliki makna bekerjasama atau bekerja bersama-sama dengan pihak lain, baik sifatnya individu, kelompok, maupun organisasi". Sedangkan menurut Ansell dan Gash (2007:544), mendefinisikan : "*Collaborative Governance* sebagai pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik". *Collaborative Governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terikat. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumberdaya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi, misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama.

### **Model Collaborative Governance**

Model *collaborative governance* menurut Thomson dan Perry (2006:22) yang memulai proses *Collaboration* adalah sebagai berikut :

1. Negosiasi  
Berarti proses bergaining antar aktor yang akan terlibat dalam *Collaboration*
2. Komitmen

Akan muncul dari masing-masing aktor atas apa yang dilakukan di dalam kerjasama tersebut

3. Proses Pelaksanaan

Merupakan bentuk pengejawantahan dari komitmen bersama yang telah diambil melalui keterlibatan seluruh aktor dan interaksi antar aktor.

4. *Assessment*/Penilaian

Untuk melihat dari setiap proses yang ada tersebut sejauh mana keaktifan dan keterlibatan masing-masing aktor.

Model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:548-558) terdiri atas beberapa tahapan berikut :

1. *Starting Condition*/ Memulai Kondisi

Yaitu Tahapan fasilitasi kerjasama di antara *stakeholder* yang ada.

2. *Facilitative Leadership*/ Kepemimpinan Fasilitasi

Merupakan tahapan yang sangat penting sekali untuk melibatkan *stakeholder* di dalam satu kesatuan, mendekatkan satu sama lain, dan menyatukannya di dalam satu spirit.

3. *Intutional design*/ Desain Kelembagaan

Merupakan aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.

4. *The Collaborative Proses*/ Proses Kerjasama

Merupakan tahapan yang dimulai dari *face-to-face dialogue* yang berorientasi pada kesepakatan bersama, dilanjutkan dengan membangun kepercayaan antar satu dengan yang lain, dan komitmen bersama untuk bersama-sama bekerjasama, sehingga bisa memunculkan adanya pemahaman bersama. Barulah setelah semua berjalan dengan baik akan bisa tercapai *outcomes* sebagaimana yang diharapkan.

### **Karakteristik Collaborative Governance**

Menurut Ansel and Gash (2007:544-545) ada beberapa kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain :

1. Kerjasama diinisiasi oleh institusi pemerintahan
2. Adanya keterlibatan aktor non pemerintah
3. Seluruh aktor terlibat dalam proses pengambilan kebijakan
4. Forum kerjasama diorganisir dan dirancang secara bersama
5. Tujuan dari forum kerjasama adalah untuk membuat keputusan bersama-sama
6. Fokus dari kerjasama adalah dalam pengambilan kebijakan dan tatakelola pemerintahan.

Menurut Liendhard dalam Subarsono (2016:181-182) menyebutkan karakteristik *Collaborative Governance* antara lain :

1. Kerjasama melibatkan setidaknya-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta
2. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi
3. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang insentif

4. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu
5. Memiliki orientasi jangka panjang
6. Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta
7. Berbagi resiko, dan
8. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Dari penjabaran karakteristik tersebut, maka jelas bahwa kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan bersama maupun tujuan kelompok atas isu tertentu. Namun, juga meliputi aspek sumberdaya, tanggung jawab, manfaat yang akan diterima maupun resiko yang akan dihadapi sehingga membutuhkan interaksi yang cukup dalam mengarahkan pada orientasi jangka panjang dari pihak yang terlibat.

### **Dimensi yang mempengaruhi *Collaborative Governance***

Menurut Wanna (2008:3-4) mengemukakan bahwa dimensi yang mempengaruhi *Collaborative Governance* diantara sebagai berikut :

1. Mencakup *cooperation* atau kerjasama untuk membangun kebersamaan, meningkatkan konsistensi, dan meluruskan aktivitas antar aktor.
2. Kerjasama juga bisa merupakan sebagai proses negosiasi, yang mencakup suatu persiapan untuk berkompromi dan membuat kesepakatan
3. Dapat melibatkan peran pengawasan, memeriksa, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat, bisa juga merupakan bentuk antisipasi bersama melalui serangkaian aturan terhadap kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi
4. Kerjasama juga bisa merupakan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk mendorong hasil atau memaksakan preferensi sendiri yang lain, sampai batas tertentu, dengan kepatuhan atau kelibatan mereka
5. Kerjasama mencakup komitmen masa depan dan intensitasnya, perencanaan atau persiapan untuk meluruskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan
6. Kerjasama mencakup keterlibatan, proses pengembangan motivasi internal dan komitmen personal terhadap proyek-proyek, keputusan, tujuan organisasi atau tujuan strategis yang akan dikerjakan.

Menurut John M Bryson dan Barbara C. Crosby (2006) dalam Purnomo (2018:16-17) mengemukakan bahwa dimensi yang mempengaruhi *Collaborative Governance* diantara sebagai berikut :

1. *Forging agreements*/Membuat Perjanjian
2. *Building leadership*/Membangun Kepemimpinan
3. *Building legitimacy*/Membangun Legitimasi
4. *Building trust*/Membangun Kepercayaan
5. *Managing conflict*/Mengelola Konflik
6. *Planning*/Perencanaan

Menurut Anshell and Gash (2007:558-561) mengemukakan bahwa dimensi yang mempengaruhi *Collaborative Governance* diantara sebagai berikut :

1. *Face-to-face Dialogue*/Dialog Tatap Muka



Semua bentuk *Collaborative Governance* dibangun dari *Face-to-Face Dialogue*/Dialog tatap muka antara pemangku kepentingan. Sebagaimana *Collaborative Governance* yang berorientasi konsensus, Dialog tatap muka sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Namun, Dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi. Ini merupakan inti dari proses dan hambatan lain untuk komunikasi yang mencegah eksplorasi keuntungan bersama. Dialog Tatap Muka merupakan langkah awal berupa dialog otentik antar para pemangku kepentingan yang didasari oleh rasional komunikatif yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

2. *Trust Building*/Membangun Kepercayaan

Kurangnya kepercayaan diantara pemangku kepentingan merupakan titik awal untuk *Collaborative Governance* yang dimana prosesnya bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol dari *Collaborative Governance* dan bisa sangat sulit untuk menumbuhkannya.

3. *Commitment to the process*/Komitmen terhadap Proses

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses *Collaborative Governance*. Bahwa tingkat pemangku kepentingan dari Komitmen terhadap Proses untuk *Collaborative Governance* adalah variabel penting dalam keberhasilan atau kegagalan. Komitmen merupakan motivasi untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Komitmen terhadap proses yang diperlihatkan dengan adanya saling ketergantungan, rasa memiliki terhadap proses, dan keterbukaan untuk menggali hal yang saling menguntungkan

4. *Shared Understanding*/Pemahaman Bersama

Pada beberapa poin dalam Proses *Collaborative Governance* para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif mereka dapat mencapai bersama-sama. Pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* tercermin dengan adanya misi yang jelas, pemahaman yang sama terhadap masalah dan mengidentifikasi nilai-nilai bersama

5. *Intermediate Outcomes*/Hasil sementara

Hasil sementara muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari *Collaborative Governance* yang mana secara konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu yang terjadi. Hasil Sementara diharapkan dapat dicapai yang berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus.

## Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena apa yang terjadi yaitu jejaring *Collaborative Governance* dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Bogdan dan Taylor (1992) dalam

Sujarweni (2014:19), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah *snowball sampling* yang merupakan teknik penarikan sampel yang menyerupai cara pembuatan bola salju, yaitu semakin lama menggelinging semakin besar. Dimulai dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak. Penarikan sampel bola salju ini mempunyai beberapa tahapan. Pertama, menentukan satu atau lebih informan untuk diwawancarai. Informan tersebut berperan sebagai titik awal penarikan sampel selanjutnya. Informan selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk informan sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini ialah mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam hal pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang diantaranya :

1. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Subang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan upaya Penanggulangan AIDS, dan bertugas mengkoordinir semua elemen untuk menaggulangi HIV/AIDS.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli HIV/AIDS, karena mereka melakukan tugas utamanya untuk penjangkauan kepada kelompok Resiko tinggi dengan tugas utamanya. Mereka menjangkau ke komunitas dan jika ditemukan orang dengan HIV/AIDS positif maka secara insentif mendorong dan mendampingi agar dibawa ke fasilitas layanan kesehatan dan jika sudah berjalan maka perlu dipertahankan untuk rutin pengobatan. Adapun LSM peduli HIV/AIDS yang menjadi informan yaitu PKBI Cabang Subang dan Yayasan RESIK Subang.
3. Orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang menjadi unit analisis dalam upaya pencegahan HIV/AIDS , dan sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Jumlah ODHA yang menjadi informan 2 orang.
4. Kelompok Potensial/Beresiko dan Kelompok Rentan terhadap HIV/AIDS, Kelompok Beresiko yaitu kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti : Penjaja Seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Dan Kelompok Rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, siswa sekolah SMA/SMK, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. Adapun informan tersebut : (1) Komunitas LSL : 15 orang, (2) anak SMK Pertiwi Ciasem : 2 orang, (3) Supir Truk Tarik Semen Pantura Subang : 1 orang, dan (4) Supir Expedisi/Barang Pantura Subang : 3 orang.

Untuk itu instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Pewawancara terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. (Sujarweni, 2014)
2. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.
3. Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data terbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Validitas data yang digunakan membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan apa yang ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia kenyataan memang benar sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

Menurut Denzim (1978) dalam Moleong (2014:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987 dalam Moleong, 2014:330-331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi Teori menurut Licon dan Guba (1981:307) dalam Moleong (2014:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dari pihak lain, Patton (1988:327) dalam Moleong (2014:331), berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*). Dengan menggunakan metode triangulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menjamin validitas data.

Menurut Mudjihardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Menurut Miles dan Faisal dalam Sujarweni (2014:34-36) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

#### 3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi, teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

#### 4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Subang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang karena berdasarkan data kasus HIV/AIDS Kabupaten Subang tahun 2018 menempati peringkat ke-7 di Jawa Barat ,dengan angka kematian mencapai 564 korban jiwa dengan penderita 1.873 orang.

## Hasil dan Diskusi

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan upaya Penanggulangan AIDS, dan bertugas mengkoordinir semua elemen untuk menanggulangi HIV/AIDS. Kantor/Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 179 Cigadung Subang. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang di bentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yaitu dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih insentif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Adapun wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Subang adalah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Subang yaitu untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan permasalahan HIV dan AIDS secara Komprehensif, Integratif, Partisipatif dan Berkesinambungan. Dalam Keputusan Bupati Subang Nomor 443/556/Kesra terdapat juga uraian mengenai susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS dan Susunan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pihak. Dengan demikian, semua SKPD dan institusi lain yang terkait dengan Penanggulangan AIDS telah menjadi anggota Komisi Penanggulangan AIDS dan memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

#### Visi dan Misi KPA Kabupaten Subang

“Memperkuat Koordinasi dan Kebijakan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”. Adapun misinya adalah Membongkar Fenomena Gunung Es di tiga Area (Tree Zero) dengan mengurangi : Kasus HIV Baru, Angka kematian akibat AIDS, dan Stigma dan Diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

**Gambar 1**

ANGGOTA KPA KAB. SUBANG		
1. Komisi IV DPRD Kab. Subang	16. DP2KBP3A Kab. Subang	30. MUI Subang
2. Kepolisian Resort Subang	17. DISPUPR Kab. Subang	31. LSM Peduli HIV dan AIDS
3. Kodim 0605 Subang	18. DISPEMDES Kab. Subang	32. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)
4. Lanud Suryadarma	19. KEMENG Kab. Subang	
	20. KESBANGPOL Kab.	



5. Yonif 312 Kala Hitam	Subang	33. Tim PKK Kab. Subang
6. BP4D Kab. Subang	21. SATPOL PP	34. DWP Kab. Subang
7. BPKD Kab. Subang	22. LAPAS II Subang	35. P2TP2A Kab. Subang
8. DINKES Kab. Subang	23. RSUD Kab. Subang	36. PWI Kab. Subang
9. DISDIK Kab. Subang	24. RS PTPN VIII Subang	37. Pergruan Tinggi yg ada di Kab. Subang
10. DINSOS Kab. Subang	25. RS Lanud Suryadarma	38. KNPI Kab. Subang
11. DISPARPORA Kab. Subang	26. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Subang	39. Karang Taruna Kab. Subang
12. DISHUB Kab. Subang	27. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Subang	40. WPA Tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan
13. DISNAKERTRANS Kab. Subang	28. PMI Cabang Subang	
14. DISKONMINFO Kab. Subang	29. Badan Narkotika (BNK) Subang	
15. DISDUKCAPIL Kab. Subang		

### **Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang**

Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Subang sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional,
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Subang,
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan lainnya secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS,
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang,
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS,
- f. Menyebarluaskan Informasi mengenai upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Aparat dan Masyarakat,
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- h. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **Organisasi Non Pemerintah di Luar Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli HIV/AIDS Kabupaten Subang merupakan mereka yang melakukan tugas utamanya untuk penjangkauan kepada

Kelompok Resiko Tinggi dengan tugas utamanya, mereka menjangkau ke komunitas dan jika ditemukan dengan orang HIV/AIDS positif maka secara insentif mendorong dan mendampingi agar dibawa ke fasilitas layanan kesehatan dan jika sudah berjalan maka perlu dipertahankan untuk rutin pengobatan. LSM peduli HIV/AIDS di Kabupaten Subang diantaranya :

1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Subang merupakan mereka yang melakukan penjangkauan ke komunitas Lelaki Suka Lelaki (LSL), Waria dan Napza Suntik atau mencari orang yang beresiko lalu dibawa kelayanan kesehatan kemudian diobati, adapun program yang dijalankan meliputi penjangkauan, merujuk dan mendampingi dengan cara memberikan informasi tatap muka antara petugas lapangan dengan komunitas. Kantor/Sekretariat LSM PKBI Cabang Subang berlokasi di Perum Puri Panji Kencana Blok D No.20 Kelurahan Cigadung Subang.
1. Yayasan Resik Cabang Subang merupakan mereka yang fokus layanannya adalah pada perempuan beresiko WPS (Wanita Pekerja Sek) Langsung dan WPS Tidak Langsung, program utamanya adalah selain melakukan pendampingan untuk upaya preventif juga melakukan advokasi kepada pemerintah dengan sasaran perempuan dan kliennya. Kantor/Sekretariat LSM Resik berlokasi di Jl. Raya Pantura Sukamandi, Ciasem Subang.

### **Jejaring *Collaborative Governance* pada Program Komunikasi, Informasi, & Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang**

Berdasarkan yang telah disampaikan sebelumnya pada bab pendahuluan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi jejaring *Collaborative Governance* pada Program Komunikasi, Informasi, & Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang dan LSM peduli HIV/AIDS Kabupaten Subang. Dengan menganalisis menggunakan Dimensi *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Huxham dan Imperial dalam Anshell and Gash, 2007:558.

Dalam proses *Collaborative Governance* yang terjadi dalam melakukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang, terdapat lembaga pemerintah yang dilaksanakan oleh KPA dan lembaga non pemerintah oleh LSM.

### ***Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka***

Menurut Huxham dan Imperial dalam Anshell and Gash (2007:558), dalam Dialog Tatap muka ini berfokus pada apakah melakukan dialog tatap muka tatkala menjadi kerjasama dalam jejaring, dan apakah dialog yang dilaksanakan dengan rekan jejaring berlangsung secara rasional komunikatif. Dimensi *Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka* ini merupakan tahap awal dalam melakukan *Collaborative Governance* pada Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS. Menurut Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2019 di Kabupaten Subang : "Secara rutin kita melakukan dialog tatap muka dengan melaksanakan

perencanaan dan evaluasi program 1 tahun 2 kali ada dirapat koordinasi dan rapat evaluasi, biasanya dilakukan bulan Juli dan November. Kita melakukan dan merancang program dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh anggota KPA yang berlangsung secara rasional komunikatif, dalam artian selain dibentuk dipertemuan formal di pertemuan non formal juga sering melakukan kegiatan itu, karena apapun yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS orang akan mencarinya ke KPA, dengan adanya pertemuan itu ada pemahaman, kepedulian, ketertarikan dan langkah lanjut yang akan dikerjakan”

Ungkapan diatas dapat memberi penjelasan bahwa para aktor dalam jejaring sudah melakukan *Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka*. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengurus PKBI Cabang Subang dan Yayasan RESIK Subang tahun 2019 : “Ya tentunya ada, ada beberapa kegiatan yang itu dilakukan kerjasama dengan pemerintah ada yang tidak, karena dari lembaga itu mempunyai program masing-masing, tapi ada satu moment dimana ada kerjasama antara LSM dengan Lembaga Pemerintahan khususnya diacara-acara itu melibatkan anggota jejaring terkait HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Dialog tatap muka dilakukan dengan rasional komunikatif, dengan adanya pertemuan itu ada pengetahuan baru”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa para pelaku jejaring sudah melakukan Dialog Tatap Muka dari *Collaborative Governance* ini dengan rasional dan komunikatif sehingga apa yang di diskusikan dapat dipahami bersama. Pada umumnya semua ungkapan KPA melihat komunikasi *Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka* itu seperti pada kegiatan-kegiatan Formal (Rakor). Pada tahun 2018 Rakor dilaksanakan 1 tahun 2 kali, Rakor ke 1 bulan Juli dengan anggota yang hadir ada 29 peserta dan Rakor ke 2 bulan November dengan 39 anggota. Adapun pada tahun 2019 Rakor dilaksanakan pada tanggal bulan Mei dengan 40 Anggota KPA Kab. Subang yang hadir.

Isi atau materi yang menjadi bahan Dialog Tatap Muka meliputi : (1) Pembukaan (disampaikan oleh Wakil Bupati Subang mewakili Bupati Subang selaku Ketua Umum KPA), (2) Laporan Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Kpa Kabupaten Subang, Pengelola Program KPA Kabupten Subang menyampaikan terkait rangkuman kegiatan KPA Kabupaten Subang di Tahun 2019, (3) Kabid Perlindungan Anak DP2KBP3A menyampaikan materi tentang perlindungan anak yang terdampak *Human Trafficking* dan HIV dalam Rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan , (4) Pemegang Program P2PL Dinas Kesehatan menyampaikan perkembangan data dan kasus HIV di Kabupaten Subang. *Face-to-Face Dialogue/ Dialog tatap muka* juga dilakukan secara Informal (Diluar Rakor) dalam kegiatan Kunjungan Lapangan adapun yang di diskusikan yaitu mengenai Hambatan dan Tantangan yang dihadapi dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. *Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka* ada yang berupa kegiatan yang langsung dengan KIE dan ada kegiatan Administratif. Untuk merumuskan *Face-to-Face Dialogue/Dialog Tatap Muka* juga dibagi menjadi dua yaitu (1) *Face-to-Face/Tatap Muka* antar aktor jejaring, dan (2) *Face-to-Face/Tatap Muka* dengan penerima manfaat. Capaian dan Target Kegiatan *Face-to-Face/Tatap Muka* antar jejaring tahun 2018 Komisi Penanggulangan

AIDS Kabupaten Subang meliputi : (1) Penyusunan Draft Perubahan SK KPA dan Peraturan Bupati Subang tentang KPA tentang SK Bupati Subang Nomor 443/556/Kesra tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dan Peraturan Bupati masih di bagian Kumdang dengan target 1 pencapaian dan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (2) Rapat Internal Sekretariat KPA tentang Anggaran Hibah turun di bulan Mei sehingga pelaksanaan kegiatan di awal Juni dengan target 12 pencapaian dan yang baru tercapai 6, kegiatan ini belum tercapai secara keseluruhan, (3) Kunjungan ke Mitra KPA meliputi SKPD, Warga Peduli AIDS, ODHA/OHIDHA dengan target 6 dan sudah tercapai 4 kegiatan ini belum tercapai secara keseluruhan, (4) Pertemuan Koordinasi tentang Rapat Koordinasi P2HIV di Perusahaan dan Rapat Koordinasi Evaluasi dengan anggota KPA, dengan target 2 kali pertemuan dan sudah tercapai 2 kali pertemuan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (5) Pertemuan dengan Pengelola Outlet Kondom yang aktif, dengan target 1 dan tercapai 1 kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (6) Pertemuan kolaborasi TB HIV meliputi pertemuan SKPD terkait, RSUD, Puskesmas, dan Kader Forkom, dengan target 1 kali pertemuan dan yang tercapai 1 kali pertemuan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (7) *Edutainment* dalam rangka kampanye perilaku sehat meliputi pertandingan futsal antar komunitas, LSM, Petugas Layanan Kesehatan da KPA target 1 dan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (8) Kunjungan Kemitraan ke KPA tentang proses pembelajaran pelaksanaan program P2HIV di Pelabuhan, dengan target 1 dan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan, (9) Pertemuan jejaring Komunitas melalui Sinergi antara Komunitas, Pegiat HIV, Layanan Kesehatan dan melalui Pemberdayaan Masyarakat target 1 dan kegiatan ini sudah tercapai targetnya secara keseluruhan. Capaian dan Target Kegiatan Face-to-Face/Tatap Muka dengan penerima Manfaat atau kegiatan langsung dengan KIE tahun 2018 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang meliputi : (1) Transport Distribusi & Monev PL ke Outlet, Reporting Distribusi Kondom dan Penguatan Outlet Baru/Lama, total Outlet 30 dan yang aktif 20 Outlet meliputi wilayah Subang, Tengah dan Pantura (tersebar di 17 Kecamatan) dengan target 12 dan tercapai 10 kegiatan ini targetnya belum tercapai secara keseluruhan, (2) Sosialisasi HIV meliputi Sosialisasi di Perusahaan, Guru dan Siswa SMA/SMK/MA, Hiburan Malam, pekerja Seks Langsung, dan Lapas, dengan target 8 dan yang tercapai 7 kegiatan ini targetnya belum tercapai secara keseluruhan.

Bahwa aspek *Face-to-Face Dialogue/Dialog* Tatap Muka belum sepenuhnya diraih atau dijalin padahal menurut Anshell and Gash *Face-to-Face Dialogue/Dialog* Tatap Muka merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses atau elemen penting dalam langkah awal *Collaborative Governance* (Anshell and Gash, 2007:558).

### **Trust Building/Membangun Kepercayaan**

Proses membangun kepercayaan antar *stakeholder* haruslah merata yang berfokus pada apakah diantara anggota jejaring tertanam rasa saling percaya satu sama lain. Menurut Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2019 di Kabupaten

Subang : “Ya, tentu. Justru begini, ketika mengadakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang perlu diawalinya yaitu adanya ketertarikan dari hati, karena kita setiap merekrut, melaksanakan kegiatan yang kita bangkitkan terlebih dahulu adalah sikap rasa saling percaya diri satu sama lain, akan tetapi masih ada pelaku jejaring yang masih sulit untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Cara mengatasi orang tersebut dengan melibatkan mereka secara langsung ke dalam setiap *event* yang yang diselenggarakan terus menerus dilakukan advokasi dan dibuatnya laporan tertulis terkait anggaran dan kegiatan yang dilakukan serta capaian dari hasil kegiatan. Dengan membangun kepercayaan sebagai modal utama untuk menunjukkan bahwa lembaga yang ada adalah lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab melaksanakan tupoksi sesuai amanat UU dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat.”

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa para aktor dalam jejaring sudah membangun kepercayaan antar pelaku jejaring namun masih ada pelaku jejaring yang sulit untuk membangun kepercayaan (Hikmawan, 2017). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus PKBI Cabang Subang dan Yayasan RESIK Subang tahun 2019: “Diantara jejaring sudah saling percaya satu sama lain dalam menjalankan tugasnya karena memiliki tupoksinya masing-masing, dan akan selalu ada yang sulit untuk membangun kepercayaan satu sama lain baik ke lembaga itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pelaku jejaring sudah melakukan *trust Building*/Membangun Kepercayaan dalam *Collaborative Governance* ini akan tetapi masih ada pelaku jejaring yang sulit untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Upaya membangun kepercayaan di antara para pelaku Program KIE sudah dilaksanakan, akan tetapi membangun kepercayaan di antara pelaku KIE tidak mudah ditempuh karena pelaku Program KIE sangat beragam dengan identitas dan latar belakang yang berbeda, kepentingan berbeda, tugas dan kompetensi berbeda, dan kemampuan sumberdaya yang berbeda.

**Tabel 1.**  
**MATRIKS KELEMBAGAAN**

No	Anggota KPA	Status Kelembagaan		Karakteristik Fungsi Lembaga		
		Pemerintah	Non Pemerintah	Medis	Non Medis	Spesifik pada KIE
1	Komisi IV DPRD Kab. Subang	√			√	
2	Kepolisian Resort Subang	√			√	
3	Kodim 0605 Subang	√			√	



4	Yonif 312 Kala Hitam Subang	√			√	
5	BP4D Kab. Subang	√			√	
6	BPKD Kab. Subang	√			√	
7	DISDIK Kab. Subang	√			√	
8	DINSOS Kab. Subang	√			√	√
9	DINKES Kab. Subang	√		√		√
10	DISPARPORA Kab. Subang	√			√	
11	DISHUB Kab. Subang	√			√	
12	DISNAKERTRANS Kab. Subang	√			√	
13	DISKOMINFO Kab. Subang	√			√	
14	DISDUKCAPIL Kab. Subang	√			√	
15	DP2KBP3A Kab. Subang	√			√	
16	Dinas PUPR Kab. Subang	√			√	
17	DISPEMDES Kab Subang	√			√	
18	KEMENAG Kab. Subang	√			√	
19	KESBANGPOL Kab. Subang	√			√	
20	Satpol PP Kab. Subang	√			√	
21	LAPAS II Subang	√			√	

22	KESRA Kab. Subang	√			√	
23	RSUD Subang	√		√		
24	RS PTPN VIII Subang		√	√		
25	RS Lanud Suryadarma Subang	√		√		
26	IDI	√		√		
27	IBI	√		√		
28	PMI Cabang Subang	√				
29	BNK Subang	√			√	
30	MUI Kab. Subang	√			√	
31	PKBI Cabang Subang		√		√	√
32	Yayasan RESIK Subang		√		√	√
33	Lembaga Kesehatan NU				√	
34	KDS		√		√	√
35	PKK Kab. Subang		√		√	
36	DWP Kab. Subang		√		√	
37	PWI Kab. Subang		√		√	
38	Perguruan Tinggi		√		√	

39	Karang Taruna Kab. Subang		√		√	
40	Kader Warga Peduli Aids		√		√	

Berdasarkan tabel diatas ada tiga Karakteristik Fungsi Lembaga yaitu (1) Medis, yang sifatnya tertutup tidak dimungkinkan adanya intervensi sehingga Lembaga sepenuhnya percaya ke Perawat, adapun lembaga tersebut : Dinkes Subang, RSUD Subang, RS PTPN VIII Subang, RS Lanud Suryadarma Subang, IDI, dan IBI. (2) Non Medis, kepercayaan muncul karena dibentuk Bersama (*By Design & By Process*), adapun lembaga tersebut : Komisi IV DPRD, Kapolres, Kodim 0605, Yonif 312 Kala Hitam, BP4D, BPKD, Disdik, Disparpora, Dishub, Disnakertrans, Diskominfo, Disdukcapil, DP2KBP3A, Dispupr, Dispemdes, Kemenag, Kesbangpol, Kesra, BNK, MUI, PKBI, Yayasan RESIK, Lembaga Kesehatan NU, KDS, PKK, DWP, PWI, Perguruan Tinggi, Karangtaruna, dan Kader Warga peduli AIDS, (3) Spesifik pada KIE, yang kepercayaan juga muncul karena dibentuk Bersama (*By Design & By Process*) adapun lembaga tersebut : Dinsos Subang, Dinkes Subang, PKBI Cabang Subang, Yayasan RESIK Subang, dan KDS.

Karakteristik Fungsi Lembaga dalam *Trust Building*/Membangun Kepercayaan diantaranya : (1) Medis, merupakan *Trust Building*/Membangun Kepercayaan dari kelompok non medis yang bentuknya *Absolut Trust*, yang dimana mempercayakan sepenuhnya konten atau isi KIE, (2) Non Medis & Spesifik pada KIE, merupakan *Trust Building*/Membangun Kepercayaan yang membuka Transformasi muatan KIE satu sama lain yang bentuknya *Relative Trust*, yang dimana ada dan tidak ada yang mempercayakan sepenuhnya konten atau isi KIE.

Bahwa aspek *Trust Building*/Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya dijalin padahal menurut Anshell and Gash *Trust Building*/Membangun Kepercayaan merupakan titik awal untuk *Collaborative Governance* yang dimana prosesnya bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan dan merupakan aspek yang paling menonjol dari *Collaborative Governance* (Anshell and Gash, 2007:558).

### ***Commitment to The Process*/Komitmen terhadap Proses**

*Commitment to The Process*/Komitmen pada proses kolaborasi ini dapat dilihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu apakah ada rasa saling ketergantungan satu sama lain, ketika menjalankan program ada rasa saling memiliki terhadap proses, serta dalam proses menjalankan program ada keterbukaan untuk menggali hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Menurut Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2019 di Kabupaten Subang : "Dalam anggota jejaring harus ada rasa saling ketergantungan satu sama lain, karena daerah pencegahan penggulungan dan Mitigasi Dampak harus saling berkaitan, karena tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri antara

pengecanaan penaggulangan dan mitigasi dampak, itu adalah satu kesatuan yang utuh dan didalam kegiatan penaggulangan HIV/AIDS ini tidak ada yang superior atau interior, artinya memang seluruh lintas sektor yang masuk keanggotaan KPA ini memiliki peranan yang sangat penting. Dalam menjalankan program tentu harus ada rasa saling memiliki terhadap proses, karena memang tidak hanya sebatas keadaan anggaran saja kita bergerak, tapi tidak ada anggarapun kita harus tetap bergerak dengan mengedepankan rasa saling memiliki terhadap proses dalam menjalankan program. Dan harus ada keterbukaan dalam menjalankan program, dari sisi kegiatan, sisi anggaran dan sisi capaian. Karena kalau kita saling menutupi antara SKPD kemia antara Lembaga-lembaga lainnya kita tidak saling tahu”

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa jejaring sudah melakukan *Commitment to The Process/Komitmen* terhadap proses dengan ada rasa saling ketergantungan dan memiliki terhadap proses yang terbuka dalam menjalankan program. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pengurus PKBI Cabang Subang dan Yayasan RESIK Subang tahun 2019: “Lembaga ini saling melengkapi bukan saling ketergantungan karena ketika saling bersinergi tujuannya akan tercapai dan tentu ada rasa saling memiliki terhadap proses yang dilaksanakan karena mempunyai program dan mempunyai donor yang sama”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa para pelaku jejaring sudah melakukan *Commitment to The Process/Komitmen* terhadap Proses dan tidak ada ketergantungan melainkan saling mendukung satu sama lain dalam *Collaborative Governance* ini. Dalam *Commitment to The Process/Komitmen* terhadap Proses Adanya pengakuan saling bergantung dapat dilihat dari adanya saling mengenal dan percaya satu sama lain karena terdapat hubungan dan saling ketergantungan berdasarkan tugas dan peran (pengakuan saling bergantung). Adanya upaya saling mengenal ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan yakni : (1) Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Subang, (2) SK Bupati Subang Nomor 433/556/kesra/2018 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang. Hal tersebut yang menjadi perlunya melibatkan LSM peduli HIV/AIDS dengan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, dan batasannya sehingga berdasarkan hal tersebut, Komisi Penanggulangan AIDS akan melibatkan LSM peduli HIV/AIDS yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam aspek *Commitment to The Process/Komitmen* terhadap Proses sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Anshell and Gash yang dimana membangun Komitmen terhadap proses merupakan variabel penting dalam keberhasilan atau kegagalan. Komitmen merupakan motivasi untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance* (Anshell and Gash, 2007:558).

### ***Shared Understanding/Pemahaman Bersama***

Menurut Huxham dan Imperial dalam Anshell and Gash (2007:558), pemahaman bersama dapat dipahami dengan adanya visi dan misi. Apakah visi dan misi sudah jelas dan mudah diimplementasikan. Menurut Pengelola Program Komisi

Penanggulangan AIDS tahun 2019 di Kabupaten Subang : “Ya visi misinya sudah jelas, dengan mengurangi kasus HIV baru, mengurangi angka kematian akibat AIDS, dan mengurangi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan sudah diimplementasikan”.

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa jejaring dalam menjalankan visi dan misinya sudah jelas dan sudah diimplementasikan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengurus PKBI Cabang Subang tahun 2019 : “Visi dan misi sudah jelas dan lagi dan masih berjalan diimplementasikan karena, kita cuma menjangkau mencari orang yang beresiko dibawa ke layanan kesehatan lalu diobati. Misi kita yaitu, menjangkau, merujuk dan mendampingi”. Kemudian pengurus Yayasan RESIK Subang tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa : “Visi dan Misi sudah jelas dan sudah berjalan diimplementasikan. Visi kita yaitu membina masyarakat guna meningkatkan pengetahuan pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan kehidupan yang baik. Adapun misinya untuk memperbesar akses informasi pendidikan dan kesehatan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pelaku jejaring sudah melakukan *Shared Understanding*/Pemahaman Bersama dalam *Collaborative Governance* ini dan pelaku jejaring mempunyai visi dan misi masing-masing yang sedang berjalan diimplementasikan. Pemahaman bersama dilakukan dengan hubungan kerja yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Hubungan Kerja Eksternal dan Hubungan Kerja Internal yang memiliki tujuan tertentu, adapun hubungan kerja tersebut : (1) Hubungan Eksternal diantaranya : Sektor/Dinas/Badan terkait, Organisasi Kemasyarakatan/Profesi, LSM/Forum KDS, Forum Warga Peduli AIDS, Bapeda, Bagian Hukum Pemkab Subang dan Bagian Kesra. Tujuan Hubungan Eksternal yaitu Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan program, Mendapatkan informasi berkaitan dengan kebijakan program penanggulangan AIDS, Mobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan AIDS. Adapun yang ke (2) Hubungan Internal diantaranya : Pengurus KPA Kabupaten Subang, Tim Asisten, Bidang Program/Advokasi/Monev, Pokja Media/CST/Edukasi/HR, Pokja PMTS, Staf Sekretariat. Tujuan Hubungan Internal yaitu Melakukan koordinasi dan sharing informasi mengenai pelaksanaan kebijakan program dan Mobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan AIDS.

Bahwa aspek *Shared Understanding*/Pemahaman Bersama sudah sepenuhnya dipahami sesuai dengan Anshell and Gash yang dimana Pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* tercermin dengan adanya misi yang jelas, pemahaman yang sama terhadap masalah dan mengidentifikasi nilai-nilai bersama (Anshell and Gash, 2007:558).

### ***Intermediate Outcome/Hasil Sementara***

Hasil sementara yang dimaksud adalah Hasil sementara diharapkan dapat dicapai yang berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus dan bagaimana hasil kerjasama dan apa kendala dilapangan. Menurut Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2019 di



Kabupaten Subang : “Hasil kerjasama sudah terlihat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, meskipun memang belum menganggarkan secara khusus dengan judul penanggulangan HIV/AIDS, tapi SKPD yang ada di Kabupaten Subang yang masuk kedalam keanggotaan KPA sudah melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS memang yang lebih banyak dari pencegahan. Dan masih ada kendala dalam jejaring dikarenakan masih ada ketidakpahaman dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing”. Berdasarkan ungkapan tersebut pelaku jejaring sudah mencapai temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati akan tetapi masih ada kendala dalam dalam jejaring yang dikarenakan masih ada ketidakpahaman dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pengurus PKBI Cabang Subang dan Yayasan RESIK Subang tahun 2019 : “Hasil kerjasama berjalan dan ada efek yang bagus untuk penanganan ini. Adapun kendala dilapangan mengenai layanan kesehatan di Kabupaten Subang, karena belum semua puskesmas memiliki alat untuk tes HIV/AIDS dan kendala di masyarakat karena mereka belum bisa menerima”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pelaku jejaring sudah melakukan *Intermediate Outcome*/Hasil Sementara namun masih ada kendala dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing dan masih ada kendala dilapangan dalam *Collaborative Governance* ini. Dalam Hasil sementara ini anggota jejaring mempunyai 3 area program penanggulangan HIV/AIDS yang dimana anggota KPA yang terdiri dari anggota SKPD tersebut mengisi 3 area yakni : (1) Pencegahan, yang bergerak di Promotif, (2) Penanggulangan, yang berarti sudah terjadi kasus (Ranah Kesehatan/Teknis), dan (3) Mitigasi Dampak, ketika sudah ada ODHA.

Adapun kumulatif kasus HIV dan AIDS tahun 1999-2018 sebanyak 1873 penderita yakni, HIV sebanyak 780(42%) penderita dan AIDS sebanyak 1093(58%) penderita dengan penemuan Kasus Baru HIV dan AIDS sebanyak 230 Kasus diantaranya kasus HIV 77(33%) dan kasus AIDS 153(67%). Dan adapun akumulatif penemuan kasus HIV/AIDS sampai dengan Desember 2018 berdasarkan Jenis Kelamin sebanyak 1873 penderita, yaitu perempuan 1048(56%) penderita dan Laki-laki 825(44%) penderita dengan penemua kasus Baru berdasarkan jenis kelamin akhir Desember 2018 sebanyak 230 kasus, yaitu perempuan 92(40%) kasus dan Laki-laki 138 (60%) kasus. KPA tidak menetapkan target yang harus menjadi acuan realisasi, yang dimana akibatnya sulit mengukur Kinerja KPA.

Bahwa aspek *Intermediate Outcomes*/Hasil Sementara belum sepenuhnya diraih padahal menurut Anshell and Gash *Intermediate Outcomes*/Hasil Sementara muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari *Collaborative Governance* dan diharapkan dapat dicapai yang berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus (Anshell and Gash, 2007:558).

## **Penerima Dampak dari Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang**

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti kemudian melakukan wawancara dengan ODHA dan Kelompok Potensial/Beresiko dan Kelompok Rentan yang merupakan penerima dampak dari Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Kelompok Potensial/Beresiko dan Kelompok Rentan yang di wawancara oleh peneliti untuk dijadikan sampel wawancara tahun 2019 yaitu Komunitas LSL (Laki Suka Laki), anak Sekolah SMK Pertiwi Ciasem Subang, dan Supir Pantura Subang. Apakah informasi yang disampaikan dipahami dan apakah terlihat ada pola kerjasama antar pelaku jejaring dalam menyampaikan informasi serta apakah tujuan sudah jelas dan apakah program KIE ini dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS. Menurut ODHA : “Program KIE dalam Pencegahan HIV/AIDS sudah dipahami dan tujuan dari program tersebut sudah jelas. Dalam kerjasamadalam program ini biasanya pelaksanaannya tidak bersama-sama, jadi masing-masing pelaksanaannya. Dan saya tidak yakin kalau program KIE ini dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS, karena tidak bisa mengandalkan .KIE saja tapi pelaksanaannya tidak dilaksanakan, jadi tergantung ke pelaksanaannya”. “Program KIE dalam pencegahan HIV/AIDS sudah dipahami dan terlihat ada kerjasama antara lembaga pemerintah dengan LSM begitupun dengan tujuannya sudah jelas. Akan tetapi mereka tidak yakin bahwa program KIE dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS karena Cuma sekilas info dan pelaksanaannya tergantung masing-masing orangnya diterapkan atau tidaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program KIE tujuannya sudah jelas dan dipahami, akan tetapi mereka tidak yakin program KIE dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS. Hal yang sama juga diungkapkan oleh anak SMK Pertiwi Ciasem Subang : “Program KIE dalam Pencegahan HIV/AIDS dapat dipahami jika menyimak dan memperhatikan materi dari awal sampai akhir dan terlihat ada kerjasama karena tujuannya sama untuk mencegah HIV/AIDS. Tujuan program KIE pun sudah jelas karena langkah-langkahnya sudah dipaparkan jelas oleh pemateri dan yakin dapat mencegah penyebaran HIV/AIDS karena dengan penyuluhan kita tahu HIV itu apa dan cara pencegahannya bagaimana ”. Kemudian Supir Truk Tarik Semen Pantura Subang juga mengatakan bahwa : “Tidak Pernah mengikuti penyuluhan HIV/AIDS, kurang tau HIV/AIDS itu apa dan Penyebaran dan Pencegahannya begitupun Bahaya HIV/AIDS tidak tahu”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Supir Expedisi/Barang Pantura Subang : “Belum pernah mengikuti penyuluhan tentang HIV/AIDS, tapi tahu apa HIV/AIDS, akan tetapi belum tahu bahayanya dan penyebarannya seperti apa”. Berdasarkan hasil wawancara atau pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dengan

Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh setiap orang, dengan adanya penyampaian program KIE mereka bisa tahu apa itu HIV/AIDS bagaimana bahayanya, penyebarannya dan pencegahannya namun mereka tidak yakin bahwa Program KIE dapat mencegah penyebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Akan tetapi Pada

Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang Tidak semua kelompok sasaran terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan KIE, tetapi pada dasarnya upaya program KIE dinilai penting dan akan penting apabila semua kelompok sasaran dilibatkan. Bahwa Kelompok sasaran tidak terlalu peduli tentang proses *Collaborative Governance*, akan tetapi mereka lebih konsen kepada materi yang disampaikan dalam program KIE.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Jejaring *Collaborative Governance* pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang belum optimal. Berikut dimensi-dimensi yang belum berjalan dengan baik dan masih ada kendala sebagai berikut :

1. *Face-to-Face Dialogue*/Dialog tatap muka  
*Face-to-Face Dialogue*/Dialog Tatap Muka ini merupakan tahap awal/ elemen penting dalam melakukan *Collaborative Governance* pada Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS dan para pelaku jejaring sudah melakukan dialog tatap muka dari *Collaborative Governance* ini dengan rasional dan komunikatif sehingga apa yang di diskusikan dapat dipahami bersama, akan tetapi belum sepenuhnya diraih atau dijalin.
2. *Trust Building*/Membangun Kepercayaan  
Proses membangun kepercayaan antar *stakeholder* merupakan titik awal untuk *Collaborative Governance* yang dimana prosesnya bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan dan haruslah merata yang berfokus pada anggota jejaring tertanam rasa saling percaya satu sama lain dan para pelaku sudah melakukan *Trust Building*/Membangun Kepercayaan dari *Collaborative Governance* ini akan tetapi masih ada pelaku jejaring yang sulit untuk membangun kepercayaan satu sama lain, sehingga belum sepenuhnya dijalin.
3. *Commitment to The Process*/Komitmen Pada Proses  
*Commitment to The Process*/Komitmen pada proses kolaborasi ini dapat dilihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu ada rasa saling ketergantungan satu sama lain, ketika menjalankan program ada rasa saling memiliki terhadap proses , serta dalam proses menjalankan program ada keterbukaan untuk menggali hal yang saling menguntungkan satu sama lain dan para pelaku sudah sepenuhnya melaksanakan *Collaborative Governance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Shared Understanding*/Pemahaman Bersama  
*Shared Understanding*/Pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* ini sudah sepenuhnya dipahami dengan adanya visi dan misi. Adapun visi dan misi

antara pelaku jejaring sudah jelas dan mempunyai visi dan misi masing-masing yang sedang berjalan diimplementasikan.

5. *Intermediate Outcome/Hasil Sementara*

Hasil sementara yang dimaksud adalah Hasil sementara diharapkan dapat dicapai yang berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus. Adapun hasil kerjasama sudah terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pelaku jejaring namun masih ada kendala dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing dan masih ada kendala dilapangan sehingga sehingga belum sepenuhnya diraih dalam *Collaborative Governance* ini.

Berdasarkan penerima dampak dari program yang dijalankan dapat diketahui bahwa dengan Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh setiap orang, dengan adanya penyampaian program KIE dalam pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang mereka bisa tahu apa itu HIV/AIDS bagaimana bahayanya, penyebarannya dan pencegahannya namun mereka tidak yakin bahwa Program KIE dapat mencegah penyebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang.

Akan tetapi Tidak semua kelompok sasaran terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan KIE, tetapi pada dasarnya Upaya program KIE dinilai penting dan akan penting apabila semua kelompok sasaran dilibatkan Dan Kelompok sasaran tidak terlalu peduli tentang proses *Collaborative Governance*, akan tetapi mereka lebih konsen kepada materi yang disampaikan dalam program KIE.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran untuk seluruh pelaku jejaring :

1. Peningkatan Sosialisasi program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang
2. Melibatkan Kelompok Sasaran dalam Kegiatan Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang

## Referensi

- Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. P. 543-571.
- Hikmawan, M. D. (2017). Politik Perbedaan: Minoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88-98.
- Huxham, Chris. 2003. *Theorizing collaborative practice*. *Public Management Review* 5:401-23.
- Imperial, Mark. 2005. *Using collaboration as governance strategi: Lesson from six watershed management program*. *Administration & Society* 37:281-320.

- <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html>
- <http://www.mediajabar.com/daerah/penularan-hiv-aids-di-subang-92-melalui-hubungan-seksual.html#>
- [http://rri.co.id/bandung/post/berita/603087/seputar\\_jabar/penderita\\_hivaid\\_s\\_di\\_su\\_bang\\_mencapai\\_1766\\_orang.html](http://rri.co.id/bandung/post/berita/603087/seputar_jabar/penderita_hivaid_s_di_su_bang_mencapai_1766_orang.html)
- Irwan. 2017. *Kearifan Lokal dalam Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Kajian Dokumen Kebijakan HIV/AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia. 2015. Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang Nomor 003/KEP/KPA-SBG/VI/2018 tentang Pembentukan Pengurus Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Purnomo, Eko dkk. 2018. *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- SK Bupati Subang Nomor 443/556/Kesra/2018 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sufianti, Ely. 2014. "Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Hal:84-85.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Thomson, Ann Marie & Perry James L. 2006. "Collaboration Processes: inside the Black Box". *Journal Public Administration Review*. P. 20-32.
- Wanna, John. 2008. *Collaborative Governance : A new era of public in Australia?. The Australian National University*.
- Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 95-115